

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN ANALISIS KELAYAKAN USAHA Mendukung KONTRIBUSI BUMDES BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI DESA

Ni Kadek Sinarwati¹, Edy Sujana², Nyoman Trisna Herawati³, Putu Eka Dianita Marvilianti
Dewi⁴, Lidwina Mersilian Manoe⁵, Ngurah Eka Utama Putra⁶

^{1,2,3,4,5,6.} Jurusan Ekonomi dan Akuntansi FE Universitas Pendidikan Ganesha

Email: nikadeksinarwati@undiksha.ac.id

ABSTRACT

Two explanations for why the preparation of a feasibility analysis for BUMDes business units is a must: 1) Article 28 paragraph 4 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Regional Financial Management states that capital participation in BUMDes through a business feasibility analysis process is required, 2) Business units that will be developed if it begins with an analysis of the feasibility of the business, the greater the possibility of obtaining profits. The manager of BUMDes Teranggana Sari has a strong desire to compile a business feasibility analysis, but they currently lack the necessary skills to do so. This condition is the background for community service. The Training activity will be held on June 3, 2025. The training and mentoring activities showed that BUMDes managers were very enthusiastic about participating in activities. This activity is beneficial for BUMDes managers and community service implementation teams.

Keywords: BUMDes; Village; Economic; Development

ABSTRAK

Dua penjelasan mengapa penyusunan analisis kelayakan unit usaha BUMDes merupakan suatu keharusan: 1) Pasal 28 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penyertaan modal dalam BUMDes melalui proses analisis kelayakan usaha, 2) Unit usaha yang akan dikembangkan jika diawali dengan analisis kelayakan usaha, semakin besar kemungkinan untuk memperoleh keuntungan. Pengelola BUMDes Teranggana Sari memiliki keinginan yang kuat untuk menyusun analisis kelayakan bisnis, tetapi saat ini mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukannya. Kondisi ini sebagai latar belakang pengabdian masyarakat. Kegiatan Pelatihan sudah terlaksana dengan lancar pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025. Kegiatan pelatihan dan pendampingan menunjukkan bahwa pengelola BUMDes sangat antusias mengikuti kegiatan. Kegiatan ini bermanfaat bagi pengelola BUMDes dan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Kata kunci: BUMDes; Desa; Ekonomi; Pembangunan

PENDAHULUAN

Program asta cita ke enam Presiden Indonesia, bapak Prabowo yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Program ini sejalan dengan nawa cita ketiga presiden sebelumnya (Bapak Ir. H. Joko Widodo) yang menyatakan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Baik nawacita asta cita keenam maupun nawa cita ketiga memiliki tujuan yang

sama yaitu mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Data Badan Pusat Statistik September 2024 menunjukkan jumlah penduduk miskin di pedesaan 11,34% lebih tinggi daripada di perkotaan 6,66%. Kondisi ini menjadi rasionalisasi pentingnya program-program pembangunan pedesaan terus diupayakan dalam rangka mencapai desa tanpa kemiskinan sebagai indikator Sustainable Development Goals/SDGs Desa pertama.

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya dalam proposal ini disingkat BUMDes

merupakan badan hukum yang dimiliki oleh pemerintah desa, diharapkan menjadi roda penggerak pembangunan ekonomi desa. Temuan beberapa riset menyatakan bahwa kehadiran BUMDes berkontribusi bagi pembangunan pedesaan. BUMDes di Kabupaten Karangasem ditemukan mampu menyerap tenaga kerja, menurunkan jumlah warga desa pindah ke kota (Sinarwati, 2019). Sumber daya BUMDes yang terdiri dari jumlah modal, jumlah tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja BUMDes ditemukan berpengaruh positif tetapi belum signifikan terhadap kewirausahaan, kinerja dan kesejahteraan pengrajin di Kabupaten Karangasem (Sinarwati dkk., 2020). BUMDes di desa Gunung Kidul di Jogjakarta, yang diteliti dengan menggunakan pendekatan Community Based Research ditemukan memberikan dampak positif pada bidang sosial ekonomi, tetapi kehadirannya belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung (Anggraeni, 2016).

Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Desa, telah berbagai dukungan terbukti meningkatkan perkembangan jumlah BUMDes (Sinarwati dkk., 2020). Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah regulasi yang memberikan prioritas untuk mengelola potensi desa (Indonesia, 2014), namun sayangnya mayoritas pengelola BUMDes menyatakan belum mampu mengelola potensi desa (Sinarwati & Prayudi, 2021). Kehadiran Perguruan Tinggi sangat diharapkan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan ke BUMDes melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

Hampir seluruh desa di Provinsi Bali memiliki BUMDes. Desa Sulangai di Kecamatan Petang Kabupaten Badung merupakan salah satu desa di Provinsi Bali yang memiliki BUMDes yang sedang berkembang dengan nama BUMDes Teranggana Sari. BUMDes ini berdiri pada tanggal 6 Juni 2014 dengan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 04 Tahun 2014 yang diperbaharui dengan Perdes Nomor 1 Tahun 2022, mengacu peraturan

pemerintah no 11 tahun 2021. Unit usaha yang dimiliki saat ini simpan pinjam dan dagang. Jumlah modal awal Rp 118.970.103 dan jumlah modal saat ini Rp 2.937.814.157. Pertumbuhan modal selama 11 tahun adalah 23,69 persen dan rata-rata pertumbuhan modal pertahun adalah 2,15 persen. BUMDes Teranggana Sari seperti mayoritas BUMDes lainnya belum mampu mengelola potensi desa. Potensi desa yang tersedia di Desa Sulangai Petang yang seharusnya dikelola BUMDes diantaranya hasil pertanian, perkebunan dan pemandangan alam yang layak untuk dikembangkan menjadi objek pariwisata.

BUMDes selama ini **belum pernah menyusun analisis kelayakan usaha**, yang diakibatkan oleh ketidakpahaman dan ketidakmampuan pengelola BUMDes. Penyusunan analisis kelayakan usaha bagi BUMDes merupakan suatu keharusan. Dua pertimbangan atas keharusan BUMDes menyusun analisis kelayakan usaha adalah **pertama** Pasal 28 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan penyertaan modal pada BUMDes melalui proses analisis kelayakan usaha, maknanya BUMDes wajib menyusun analisis kelayakan usaha saat akan mengembangkan unit usaha. Penyusunan analisis kelayakan usaha bertujuan mematuhi peraturan dan mengetahui apakah suatu rencana usaha layak atau tidak dilanjutkan. Pertimbangan **kedua** unit usaha yang akan dikembangkan yang sudah didahului oleh analisis kelayakan usaha, lebih besar kemungkinan untuk berhasil daripada tidak disertai dengan analisis kelayakan usaha.

Hasil observasi dan wawancara dengan pengelola BUMDes Teranggana Sari di Desa Sulangai Kecamatan Petang, menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peluang untuk mengelola potensi desa agar mampu meningkatkan kontribusinya bagi pembangunan ekonomi desa dan memiliki keinginan kuat untuk memiliki kemampuan menyusun analisis kelayakan usaha. Direktur BUMDes dengan nama bapak Putu Sukerta, dan sekretaris dengan

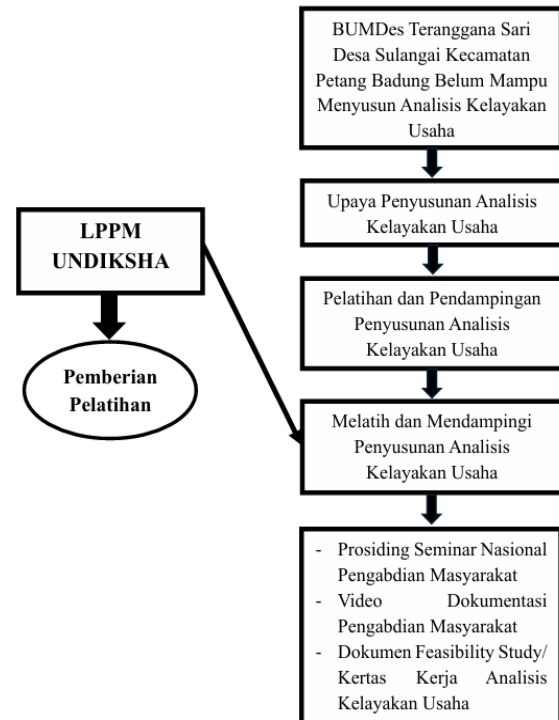
nama ibu Prima Wijani sangat mengharapkan kehadiran tim pengabdian masyarakat dari Universitas Pendidikan Ganesha untuk memberikan pelatihan dan pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha.

Mengacu pada pemaparan analisis situasi, masalah yang teridentifikasi di BUMDes Teranggana Sari Desa Sulangai adalah BUMDes memiliki peluang untuk mengembangkan usaha dengan mengelola potensi desa, tetapi potensi desa belum mampu dikelola. Pengelola BUMDes memiliki kemamuan kuat untuk mengembangkan usaha yang diawali dengan analisis kelayakan usaha, tetapi belum memiliki pemahaman dan kemampuan menyusun analisis kelayakan usaha.

Pengabdian masyarakat ini bertujuan mewujudkan kondisi baru dalam pengelolaan BUMDes di BUMDes Teranggana Sari Desa Sulangai. Kondisi baru dalam pengelolaan BUMDes yang dimaksud adalah pengelola BUMDes mampu menyusun analisis kelayakan usaha dalam mengelola potensi desa. Pencapaian tujuan jangka pendek adalah pengelola BUMDes mampu menyusun analisis kelayakan usaha dalam pengelolaan BUMDes. Pencapaian tujuan jangka panjang adalah BUMDes mampu mengelola potensi desa sehingga BUMDes mampu meningkatkan kontribusinya bagi pembangunan ekonomi desa.

METODE

Kerangka pemecahan masalah menggambarkan permasalahan yang dihadapi BUMDes, upaya penanganan masalah yang dilakukan tim pengabdian dan output atau luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian masyarakat. Kerangka pemecahan masalah disajikan pada Gambar 1.

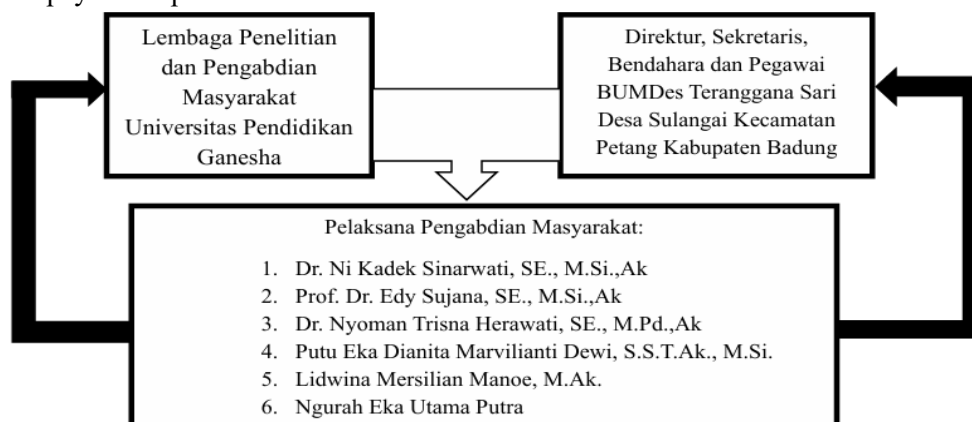


Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Analisis Kelayakan Usaha Mendukung Kontribusi BUMDes Bagi Pembangunan Ekonomi Desa

Khalayak sasaran dari program pengabdian masyarakat Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Analisis Kelayakan Usaha Mendukung Kontribusi BUMDes Bagi Pembangunan Ekonomi Desa Di BUMDes Desa Sulangai Petang Badung adalah Direktur, sekretaris, bendahara dan pegawai BUMDes. Pelaksana Program Pengabdian Masyarakat (P2M) Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Analisis Kelayakan Usaha di BUMDes Teranggana Sari di Desa Sulangai Kecamatan Petang Kabupaten Badung adalah dosen di Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi dan Akuntansi. Dalam hal ini pelaksana merupakan pihak yang menghubungkan antara Universitas Pendidikan Ganesha khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan masyarakat khususnya pengelola BUMDes Teranggana Sari di Desa Sulangai Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan penyusunan merupakan wadah

yang tepat bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan darma ketiganya yakni pengabdian kepada masyarakat, yang sekaligus merupakan upaya memperkenalkan keberadaan

program studi non kependidikan kepada masyarakat. Keterkaitan antara pihak-pihak yang terlibat dalam program ini disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Keterkaitan Para Pihak Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Analisis Kelayakan Usaha Mendukung Kontribusi BUMDes Bagi Pembangunan Ekonomi Desa Di BUMDes Teranggana Sari Petang Badung

Untuk dapat melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha di BUMDes Teranggana Sari di Desa Sulangai, Kecamatan Petang Kabupaten Badung dengan baik dan terarah, maka metode pelaksanaan kegiatan dirancang dengan sistematis dalam beberapa tahapan yaitu: tahap persiapan, pelaksanaan, tahap

pengawasan/monitoring dan tahap penilaian/evaluasi.

Rancangan Evaluasi terhadap kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha di BUMDes Teranggana Sari Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 1.

TABEL 1. RANCANGAN EVALUASI

Aspek Yang Dievaluasi		Data Yang Dikumpulkan	Alat Pengumpulan Data	Kriteria Keberhasilan
I. Proses		1. Kehadiran peserta	Absensi peserta awal	Minimal 70% peserta hadir
		2. Aktivitas peserta dalam kegiatan	Absensi peserta tiap sesi	Minimal 70% peserta hadir mengikuti secara penuh
II. Produk	1. Pemahaman Analisis Kelayakan Usaha	Nilai peserta terhadap pre dan post tes yang diberikan	Tes/soal yang berhubungan dengan penyusunan analisis kelayakan usaha	Minimal 70% peserta memperoleh nilai 100
	2. Kemampuan menyusun kertas kerja analisis kelayakan usaha	Kesesuaian Kertas Kerja analisis kelayakan usaha	Lembar penyusunan analisis kelayakan usaha	Kertas kerja analisis kelayakan usaha

Sumber: Hasil pemikiran tim pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan penyusunan analisis kelayakan usaha untuk meningkatkan kontribusi BUMDes bagi pembangunan ekonomi desa di BUMDes Teranggana Sari, Desa Sulangai Kecamatan Petang Kabupaten Badung dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025. Kegiatan dihadiri oleh kepala urusan pemerintahan desa dan seluruh pengelola BUMDes, bertempat di unit usaha perdagangan BUMDes. Kegiatan pelatihan menunjukkan semangat dan kemauan tinggi dari pengelola BUMDes untuk mampu menyusun analisis kelayakan usaha agar unit usaha yang akan dijalankan BUMDes lebih besar peluang untuk tumbuh dan berkembang. Tindak lanjut dari pelatihan adalah pengawasan atau monitoring yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2025. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk menemukan kendala yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh pada saat pelatihan. Tidak terdapat kendala berarti yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kendala ditemukan pada saat implementasi adalah kesulitan untuk memperkirakan pendapatan yang mungkin diperoleh dan biaya yang mungkin dikeluarkan dari beberapa alternatif usaha. Berikut disajikan foto-foto kegiatan pelatihan, sebagai pameri adalah ketua tim pengabdian. Ketua tim menyajikan materi yang diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh pengelola BUMDes.



Gambar 3. Pembukaan yang dihadiri oleh kepala urusan pemerintahan Desa Sulangai



Gambar 4. Pelaksanaan pelatihan



Gambar 5. Pelaksanaan pelatihan



Gambar 6. Saat monitoring

SIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan pengabdian masyarakat pelatihan dan pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha untuk mendukung kontribusi BUMDes bagi pembangunan ekonomi desa adalah: Pertama, pelaksana operasional BUMDes Teranggana Sari mendapatkan pengetahuan tentang tata cara menyusun analisis kelayakan usaha. Acara dibuka oleh kepala urusan pemerintahan desa. Kedua, Peserta mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Ketiga, materi disampaikan oleh Dr. Ni Kadek Sinarwati, SE.,M.Si.,Ak selaku ketua tim pengabdian masyarakat. Keempat, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan pelatihan dan peserta menyatakan pelatihan sangat bermanfaat. Kelima, kegiatan monitoring dilakukan tanggal 18 Juli, menemukan kesulitan yang dihadapi saat implemmentasi hasil pelatihan adalah sulit memperkirakan pendapatan dan biaya yang mungkin terjadi ketika membuka unit usaha baru. Kesulitan ini dicarikan solusi dengan memberikan link contoh-contoh analisis kelayakan usaha sebagai pembandingan. Saran yang diberikan kepada pengelola BUMDes adalah untuk terus melatih diri dan meningkatkan kemampuan administrasi pengelolaan BUMDes. Kepada pemerintah desa diharapkan tetap memberikan dukungan finansial dan moril untuk meningkatkan kontribusi BUMDes bagi pembangunan ekonomi desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN STUDI PADA BUMDES GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA. *MODUS*, 28(2), 1–14.
- Indonesia, P. R. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* , (2014). Indonesia.

- Ni Kadek Sinarwati, A. M. (2019). The Role of Village Own Enterprises to Rural Development. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law. The Role of Village Own Enterprises to Rural Development. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 18(5), 77–83.
- Sinarwati, N. K., Marhaeni, A., Made Utama, S. I., & Budi, S. (2020). Does Entrepreneurship Supply Chain Management Mediate the Effect of VOE Resources and Social Capital to Performance of Craftsmen? In *Int. J Sup. Chain. Mgt* (Vol. 9).
- Sinarwati, N. K., & Prayudi, M. A. (2021). Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 505. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.37931>
- Sinarwati, N. K., Yasa, I. N. P., & Putra, I. M. P. A. (2020). Does Indonesian Government Program Have an Impact on the Development of Village-Owned Enterprise? *158(Teams)*, 31–36. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201212.005>